

62% Unique

Total 31496 chars (**2000 limit exceeded**) , 240 words, 7 unique sentence(s).

Essay Writing Service - Paper writing service you can trust. Your assignment is our priority! Papers ready in 3 hours! Proficient writing: top academic writers at your service 24/7! Receive a premium level paper!

Results	Query	Domains (original links)
3 results	Semakin kecil nilai koefisien berarti daerah semakin tergantung pada pemerintah pusat	ejournal.unitomo.ac.id researchgate.net ejournal.unitomo.ac.id
Unique	Sebaliknya semakin besar koefisien ketimpangan fiskal menunjukkan semakin mandiri daerah-daerah tersebut dalam membiayai pengeluarannya	-
1 results	Kata Kunci: Ketimpangan fiskal, Desentralisasi fiskal, daerah otonom	ejournal.unitomo.ac.id
Unique	Kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah	-
8 results	Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah	economy.okezone.com priyohari.files.wordpress.com digilib.uns.ac.id ejournal.unitomo.ac.id download.portalgaruda.org wrihatnolo.blogspot.com
Unique	Hamid (2003) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk	-
Unique	KAJIAN KETIMPANGAN FISKAL (FISCAL IMBALANCE) DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DAERAH OTONOM Suyanto Fakultas Ekonomi Universitas	-
Unique	comAbstrak: Tulisan ini mengkaji secara deskriptif ketimpangan fiskal (fiscal imbalance), baik sebelum maupun setelah otonomi	-
3 results	maupun ketimpangan fiskal horisontal (horizontal fiscal imbalance) yang dikaji berdasarkan tingkatan pemerintahan, baik pada kabupaten	ejournal.unitomo.ac.id researchgate.net ejournal.unitomo.ac.id
Unique	Konsep perhitungan besarnya koefisien ketimpangan fiskal dilakukan menggunakan berbagai formula dari para ahli, dimana	-
1 results	pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat	publikasiilmiah.uns.ac.id
Unique	Oleh karena itu, desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bemegara dalam	-

Top plagiarizing domains: [ejournal.unitomo.ac.id](#) (6 matches); [researchgate.net](#) (2 matches); [wrihatnolo.blogspot.com](#) (1 matches); [publikasiilmiah.uns.ac.id](#) (1 matches); [download.portalgaruda.org](#) (1 matches); [priyohari.files.wordpress.com](#) (1 matches); [economy.okezone.com](#) (1 matches); [digilib.uns.ac.id](#) (1 matches);

KAJIAN KETIMPANGAN FISKAL (FISCAL IMBALANCE) DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DAERAH OTONOM
Suyanto Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Yanto_dwa@yahoo. com
Abstrak: Tulisan ini mengkaji secara deskriptif ketimpangan fiskal (fiscal imbalance), baik sebelum maupun setelah otonomi daerah diterapkan. Ketimpangan fiskal (fiscal imbalance) pada tulisan ini, meliputi ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance), maupun ketimpangan fiskal horisontal (horizontal fiscal imbalance) yang dikaji berdasarkan tingkatan pemerintahan, baik pada kabupaten / kota maupun provinsi. Konsep perhitungan besarnya koefisien ketimpangan fiskal dilakukan menggunakan berbagai formula dari para ahli, dimana koefisien ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance) nilainya antara 0 sampai dengan 1. Semakin kecil nilai koefisien berarti daerah semakin tergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya semakin besar koefisien ketimpangan fiskal menunjukkan semakin mandiri daerah-daerah tersebut dalam membiayai pengeluarannya. **Kata Kunci: Ketimpangan fiskal, Desentralisasi fiskal, daerah otonom.** 1. Latar Belakang Kebijakan desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik, sosial budaya, dan ekonomi, sehingga perubahan politik dan sosial budaya terutama di negara-negara berkembang telah diwarai dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bemegara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. **Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.** Hamid (2003) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk d